

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dapat dikatakan bahwa mereka masih dalam kategori yang rentan terhadap masalah-masalah sosial.

Anak adalah harapan setiap orangtua dan keluarga. Dalam cakupan yang lebih luas anak adalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia dimasa yang akan datang.¹ Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama untuk memberikan dan memenuhi hak-hak anak dengan mewujudkan dunia yang layak untuk mereka.

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 kemudian mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya dan bahwa Indonesia akan

¹Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulana Irfan. "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung)". *Share Social Work Jurnal* Vol. 5 No. 1. Hlm. 11-14

melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Sejak diratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk membuat kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.² Menurut Peraturan Menteri tersebut, Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan menjadi KLA apabila kabupaten/kota tersebut dapat memenuhi hak anak yang diukur melalui indikator KLA. Indikator KLA meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat lima klaster hak anak yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Adapun penilaian KLA dilakukan oleh tim independen yang beranggotakan pakar anak, kementerian/lembaga

²Ibid

(Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham, Setneg, Kantor Staf Presiden (KSP) dan KPAI. Tahapan penilaian melalui empat tahap, yakni penilaian mandiri, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, dan finalisasi.³ Penilaian terbagi dalam masing-masing klaster yakni:

- a. Kelembagaan dengan skor nilai 150
- b. Klaster 1 yakni hak sipil dan kebebasan dengan skor nilai 135
- c. Klaster 2 yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan skor 205
- d. Klaster 3 yakni kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan skor 185
- e. Klaster 4 yakni pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan skor 110
- f. Klaster 5 yakni perlindungan khusus dengan skor 215

Dari penilaian yang terbagi dalam masing-masing klaster tersebut, nantinya akan dijumlah yakni jika semua terpenuhi akan mendapat skor total 1000. Setelah mendapat penilaian, akan diperoleh penghargaan dengan kategori:

- a. Kategori pratama, dengan skor 501-600
- b. Kategori madya, dengan skor 601-700
- c. Kategori nindya, dengan skor 701-800
- d. Kategori utama, dengan skor 801-900
- e. Kategori KLA, dengan skor 901-1000

³ <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/107081/kebumen-terima-penghargaan-anugerah-kabupaten-layak-anak> diakses 09 November 2019 pukul 19.04 WIB

Adanya penilaian tersebut, pada tahun 2015 diperoleh penerima penghargaan dari masing-masing kategori yakni:

Tabel 1. 1
Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2015

Kategori Peringkat Penghargaan KLA	Jumlah	Kabupaten/Kota
UTAMA	-	-
NINDYA	3	Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar
MADYA	24	Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Klaten, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung, Kota Malang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kota Kendari, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Malang, Kota Pontianak
PRATAMA	50	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu,

		Kabupaten Bintan, Kota Batam, Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Tangerang Selatan, Administrasi Jakarta Timur, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Salatiga, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bojonegoro, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kabupaten Kulonprogo, Kota Kupang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kota Bontang
--	--	--

Sumber: Dokumen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2015:19)

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai daftar penerima penghargaan kabupaten/kota layak anak pada tahun 2015, terdapat 3 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan kategori peringkat nindya, 24 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan kategori peringkat madya, 50 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan kategori peringkat pratama, dan belum ada kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan dengan kategori peringkat utama. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini memang belum ada kabupaten/kota yang benar-benar layak anak, yang ada adalah kabupaten/kota yang merintis sebagai daerah ramah anak. Sampai saat ini sudah banyak kabupaten/kota di Indonesia yang menginisiasi menjadi kabupaten/kota layak anak, begitu pula di Provinsi Jawa Tengah. Adapun daftar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menginisiasi sebagai kabupaten/kota layak anak yaitu:

Tabel 1. 2
Daftar kabupaten/kota yang menginisiasi pengembangan kabupaten/kota layak anak sampai dengan Desember 2015

PROVINSI JATENG 35 kab/kota
Kota Surakarta, Kab Sragen, Kab Grobogan, Kab Rembang, Kab Karanganyar, Kota Magelang, Kab Brebes, Kab Kebumen, Kota Semarang, Kab Wonosobo, Kab Boyolali, Kab Magelang, Kab Semarang, Kab Cilacap, Kab Kudus, Kab Banjarnegara, Kab temanggung, Kab Wonogiri, Kab Jepara, Kab Demak, Kab Pekalongan, Kab Pemasang, Kab Klaten, Kota Salatiga, Kab Batang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Blora, Kab. Kendal, Kab. Pati, Kab Purworejo, Kab Banyumas, Kab Sukoharjo

Sumber: Dokumen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2015:20)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas mengenai kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menginisiasi pengembangan kabupaten/kota layak anak, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 33 diantaranya menginisiasi pengembangan sebagai kabupaten/kota layak anak. Seperti halnya Kabupaten Kebumen, daerah tersebut sudah memperoleh penghargaan sebagai kabupaten/kota layak anak sejak tahun 2013 serta penghargaan kategori madya pada tahun 2019. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk mewujudkan KLA. Penghargaan terbagi dalam lima kategori yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemudian pada penerimaan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2018 yang digelar di Surabaya, bahwa tahun 2018 terdapat 389 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah berkomitmen untuk menjadi KLA. Dari jumlah tersebut, 176 kabupaten/kota telah berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori. Terkait upaya perlindungan anak, pada tahun 2018 Kabupaten Kebumen telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kebumen. KPAD dibentuk secara partisipatif, dengan melibatkan semua unsur yang berkepentingan dengan perlindungan anak. KPAD ini untuk menjamin perlindungan anak. Tugas KPAD diantaranya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak serta melakukan upaya pencegahan, respon dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan masalah anak. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait dengan kepedulian hak dasar

anak telah ditunjukkan melalui program dan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁴

Setelah beberapa kali Kabupaten Kebumen mendapat peringkat pertama dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA), kini di tahun 2019 meningkat mendapat peringkat Madya. Untuk tahun 2019 Kabupaten Kebumen mendapat peringkat Madya dengan perolehan nilai 628. Jika ingin meningkat lagi menjadi Nindya maka harus mencapai nilai 700. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dispermades Marlina Indriyaningrum, SKM. M.Kes mengatakan ada 9 komponen kunci disetiap indikator dalam Kabupaten Layak Anak diantaranya Perda tentang KLA, dukungan anggaran, adanya Forum Anak, Keterlibatan lembaga masyarakat, Kemitraan dengan dunia usaha, kemitraan dengan media dan inovasi dalam KLA. Namun kelemahan kita adalah pada pendokumentasian kegiatan yang sudah dilaksanakan.⁵

Jika dilihat dari masalah-masalah sosial mengenai perlindungan anak di Kabupaten Kebumen, menunjukkan bahwa:

⁴ <http://www.kebumenekspres.com/2018/07/kebumen-kembali-raih-penghargaan.html> diakses 09 November 2019 pukul 18.46 WIB

⁵ <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4912> diakses 08 November 2019 pukul 18.56

Tabel 1. 3
Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Di Kabupaten Kebumen

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2013	132
2	2014	83
3	2015	120
4	2016	129
5	2017	85
6	2018	116

Sumber: Data diolah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2018

Berdasarkan pada data tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa kasus mengenai perlindungan terhadap anak di Kabupaten Kebumen masih cukup banyak yakni untuk tahun terakhir yaitu 2018 terdapat 116 kasus yang mana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 85 kasus. Meningkatnya permasalahan kekerasan pada anak merupakan salah satu bukti bahwa penerapan kebijakan kabupaten layak anak belum dapat berjalan secara maksimal. Dengan adanya berbagai kasus mengenai perlindungan anak, peraturan mengenai perlindungan anak di Kabupaten Kebumen sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya peraturan daerah tersebut, masyarakat berharap bahwa kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan program-program strategis untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan pada anak.

Dengan adanya berbagai kasus mengenai perlindungan terhadap anak di Kabupaten Kebumen, pemerintah Kabupaten Kebumen tetap menginisiasi Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten layak anak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program/kegiatan pengembangan Desa Ramah Anak yakni di Desa Candi Kecamatan Karanganyar dan Desa Adikarso Kecamatan Kebumen, sedangkan untuk kecamatan semuanya sudah menginisiasi.⁶ Kemudian terdapat pembangunan taman yakni Taman Kota Kebumen atau dikenal juga dengan Taman H.M Sarbini. Pembangunan Taman Sarbini tersebut dipadukan dengan konsep lalu lintas dengan wujud pembangunan taman lalu lintas di area tersebut, tujuannya adalah sebagai wisata edukasi atau pembelajaran tertib lalu lintas bagi anak-anak dan remaja. Sampai tahun 2018 Kabupaten Kebumen masih memperoleh penghargaan kategori peringkat pertama sebagai kabupaten layak anak, namun pada tahun 2019 Kabupaten Kebumen dapat memperoleh kategori peringkat madya sebagai kabupaten layak anak.

Sehubungan dengan adanya peningkatan kategori peringkat pada tahun 2019 di Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten Layak Anak, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten layak anak, penelitian ini begitu penting dilakukan karena perlunya strategi yang

⁶Sugihartana, Bagian Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen yang menangani KLA, 19 November 2018

digunakan dalam mengembangkan suatu daerah menjadi kabupaten/kota layak anak seperti Kabupaten Kebumen.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas mengenai kabupaten/kota layak anak bahwa Kabupaten Kebumen memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak pada kategori peringkat pertama hingga madya, sehingga dapat diambil suatu rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana strategi dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten Layak Anak pada tahun 2019 ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten Layak Anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian tersebut yakni:

1. Untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten layak anak.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten Layak Anak

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai strategi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten layak anak. Dengan demikian dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat digunakan dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan memberikan informasi umum mengenai suatu strategi yang digunakan dalam rangka mengembangkan suatu predikat penghargaan sebagai kabupaten layak anak.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai strategi pengembangan dalam rangka pengembangan kabupaten/kota layak anak.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan maupun kritikan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mengenai strategi-strategi yang digunakan dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten layak anak.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Kabupaten/Kota Layak anak sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eddy Suryanto dalam bentuk *Jurnal* yang berjudul Surakarta Kota Layak Anak Dinilai Hanya Formalitas. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kota Surakarta belum semua terpenuhi/dilaksanakan dengan optimal masih banyak indikator dalam tahapan sekedar wacana untuk dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dari 10 (sepuluh) kelurahan di 5 (lima) kecamatan yang dijadikan sampel belum satupun kelurahan yang mampu sepenuhnya melaksanakan 31 (tigapuluh satu) indikator Kota Layak Anak. Hampir seluruh kelurahan yang dijadikan sampel hanya mampu melaksanakan indikator Kota Layak Anak sekitar 50 – 60 % saja, bahkan ada kelurahan yang hanya mampu melaksanakan di bawah 50 %. Hal ini menunjukkan bahwa kota Surakarta akan mengalami kesulitan mendapat predikat Kota Layak Anak Utama ataupun Kota Layak Anak manakala pelaksanaan indikator di kelurahan belum dapat dioptimalkan.⁷ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rangga Reisdian, M. Saleh Soeaidy dan Sukanto dalam bentuk *Jurnal* yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan

⁷ Eddy Suryanto. (2015). Surakarta Kota Layak Anak Dinilai Hanya Formalitas. *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 08 No. 02. Hal. 166-167

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). Hasil dari penelitian tersebut adalah Peneliti masih melihat pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat dan masih ada kegagalan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak Kabupaten Jombang, mempunyai standar implementasi yang mengacu atas indikator implementasinya. Adanya strategi yang dapat dilakukan, sumber daya kebijakan, organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dibantu dengan organisasi-organisasi terkait. Namun, masih kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi.⁸

Senada dengan penelitian pada paragraf sebelumnya, yakni penelitian dalam bentuk *Jurnal* yang dilakukan oleh Dewi kartika Ratri dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Probolinggo sudah berjalan selama 10 bulan sejak disahkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak pada Oktober 2013. Dalam kurun waktu tersebut, implementasi kebijakan kota layak anak sudah berjalan cukup baik walaupun jauh dari kata sempurna tetapi tidak dapat

⁸ Ranga Reisdian, M. Saleh Soeaidy, Sukanto. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No. 6, Hal. 1247

dikatakan gagal karena dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan kota layak anak menjadi terhambat atau terhenti.⁹ Kemudian terdapat penelitian dari Muhammad Erwin Dianto dalam bentuk *skripsi* dengan judul Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah Program KLA di Desa Sendangtirto mulai berjalan pada awal tahun 2015 hingga seterusnya. Implementasi KLA di Desa Sendangtirto dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Pengaplikasian program KLA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sendangtirto berkerjasama dengan kader di tiap-tiap padukuhan dan seluruh *stakeholders* meliputi lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu: klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster perlindungan, klaster infrastruktur, serta klaster lingkungan hidup, budaya dan pariwisata. Pelaksanaan program KLA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap dan faktor struktur birokrasi. Faktor disposisi atau sikap adalah kunci keberhasilan Program KLA mengingat didalamnya terdapat kesungguhan, kecakapan, kejujuran dan komitmen dari implementer untuk mengimplementasikan program KLA. Program ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun

⁹ Dewi Kartika Ratri. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*. 10 September 2014. Hal. 11

dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya keuangan yang dikeluhkan oleh para implementer, dapat memperlambat laju pelaksanaan program KLA itu sendiri.¹⁰

Kemudian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Reviansyah Ramadhan yakni penelitian dalam bentuk *skripsi* yang dengan judul Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok (Studi Penelitian di Kota Depok Tahun 2015). Hasil dari penelitian tersebut adalah penyelenggaraan Kota Layak Anak diperuntukkan untuk menjamin kesejahteraan anak serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Beberapa faktor lingkungan kebijakan menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak, dimulai dari letak geografis Kota Depok yang merupakan kota penyangga DKI Jakarta dan juga kota tujuan hunian para pendatang. Kemudian berimbas pada tingginya laju pertumbuhan penduduk yang bukan hanya berasal dari angka kelahiran juga perpindahan penduduk. Kedua hal tersebut membentuk kebudayaan politik dalam masyarakat yang beragam, serta muncul juga struktur sosial yang dapat menimbulkan adanya beberapa masalah sosial salah satunya adalah kemiskinan di Kota Depok. Beberapa hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok, hal tersebut dikarenakan dapat mempengaruhi situasi pengasuhan serta tumbuh kembang anak. Kemudian pada tahun 2013 pemerintah Kota Depok menetapkan regulasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak

¹⁰ Muhammad Erwin Dianto. 2016. Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN SUNAN KALIJAGA. Hal. x (*SKRIPSI*) <http://digilib.uin-suka.ac.id/19579/> diakses 15 November 2019 pukul 08.38 WIB

Anak. Adanya regulasi tersebut mengantarkan Kota Depok yang sebelumnya memperoleh penghargaan peringkat madya meningkat menjadi nindya. Namun, peningkatan prestasi tersebut tidak menjadikan kinerja dari implementasi penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi baik. Masih terdapat beberapa permasalahan anak yang muncul.¹¹

Meskipun penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun penelitian yang sudah pernah dilakukan tersebut dapat diambil suatu benang merah bahwa secara keseluruhan penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada implementasi dari program-program kabupaten/kota layak anak, sehingga peneliti dalam penelitian ini mengambil fokus pada strategi yang digunakan oleh pemerintah/subjek penelitian untuk dapat mengembangkan kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Kebumen.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Manajemen Strategis

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.¹² Sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Seorang yang menjadi manajer mengambil alih kewajiban-kewajiban yang penting, dan meniadakan kecenderungan untuk melakukan semua

¹¹ Reviansyah Ramadhan. 2017. Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok (Studi Penelitian di Kota Depok Tahun 2015). Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Hal. 145-147 (*SKRIPSI*)

¹² George R. Terry. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 1

urusan sendiri, melainkan melalui usaha kerja para bawahan manajer. Pada hakekatnya manajemen secara luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹³ Sedangkan manajemen strategis menurut Fred R. David didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.¹⁴ David menyarankan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap:

a. Perumusan strategi

Mengembangkan pernyataan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dikejar.

b. Implementasi strategi: Menetapkan tujuan program tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan strategi yang dirumuskan; mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran, dan mengembangkan dan memanfaatkan sistem manajemen informasi.

¹³ Husnaini Usman. 2011. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 5

¹⁴ Fred R. David. 2009. *Manajemen Strategis*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. Hal. 5

- c. Evaluasi strategi: Tiga kegiatan evaluasi strategi yang mendasar adalah
- a) meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini,
 - b) mengukur kinerja, dan
 - c) mengambil tindakan korektif¹⁵

Jadi, manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah keputusan dan tindakan yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, tetapi apapun tujuan yang diterapkan oleh suatu organisasi, manajemen strategis adalah suatu proses terpenting untuk mencapai tujuan tersebut.

Kemudian menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen manajemen strategis merupakan serangkaian tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adapun proses manajemen strategis menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi empat elemen dasar yakni:

- a. Mengamati Lingkungan (*Enviromental Scanning*)

Mengamati lingkungan adalah kegiatan memonitoring faktor internal organisasi dan eksternal organisasi melalui konsep kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threaths*).

¹⁵ Fred R. David. 2011. *Strategic Managemen Concept And Cases*. United States of America: Pretince Hall. Hal. 6-7

b. Penyusunan Strategi (*Strategy Formulation*)

Penyusunan strategi membahas mengenai pengembangan rencana jangka panjang seperti penentuan visi dan misi, tujuan yang akan dicapai, mengembangkan strategi yang diwujudkan dalam suatu program maupun prosedur sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan organisasi.

c. Pelaksanaan Strategi (*Strategy Implementation*)

Pelaksanaan strategi merupakan penerapan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan melalui pengembangan program, budget, dan prosedur. Pelaksanaan strategi pada setiap organisasi dapat berbeda-beda atau menyesuaikan dengan keadaan dari lingkungan organisasi tersebut.

d. Evaluasi atau kontrol

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan strategi yang telah disusun, maka organisasi memerlukan sebuah pengawasan baik dari keanggotaan atau pihak internal maupun pihak ketiga atau eksternal.¹⁶

1.6.2. Analisis SWOT

Pengertian analisis SWOT menurut Rangkuti adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, dimana setiap perusahaan harus bisa memaksimalkan setiap kekuatan (*Strenght*) dan peluang

¹⁶ Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Midarti, "Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1. Hal. 1-5

(*opportunities*) dan bisa meminimalkan kelemahan (*weakness*) serta ancaman (*Threats*).

Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi yang ada. Pendekatan ini menganjurkan bahwa isu pertama organisasi harus dianalisis secara hati-hati dan cermat. Formulasi strategi harus diarahkan kepada berbagai organisasi yang penting dan mendesak untuk segera diselesaikan.

Kekuatan adalah kondisi suatu perusahaan yang mampu untuk melakukan semua tugasnya secara baik dikarenakan semua sarana dan prasarana sangat mencukupi (umumnya diatas rata-rata industri).¹⁷

Kelemahan adalah analisis lingkungan internal perusahaan yang membantu manajemen untuk membantu adanya kelemahan-kelemahan penyimpangan yang membuat posisi perusahaan tidak menguntungkan sehingga mempengaruhi tingkat kemampuan bersaing dengan para pesaing dalam industri manufaktur.¹⁸

Peluang adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal perusahaan yang membantu manajemen dalam mencari dan mengetahui apa saja yang menjadi peluang dan kesempatan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sehingga perusahaan tersebut dapat meraih pangsa pasar dengan keuntungan yang lebih besar.¹⁹

¹⁷Freddy Rangkuti. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Cetakan Ke-16. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 18

¹⁸ Ibid, Hal. 19

¹⁹ Ibid,

Ancaman adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal perusahaan yang membantu manajemen untuk mengetahui tantangan yang akan dan telah dihadapi perusahaan yang timbul karena adanya suatu kecenderungan atau perkembangan yang tidak menguntungkan di luar perusahaan.²⁰

Analisis SWOT bergantung pada kemampuan para penentu strategi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan serta ancaman yang harus dihadapi. Matriks kekuatan- kelemahan- peluang- ancaman adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang dapat membantu para pengambil kebijakan mengembangkan empat jenis strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT.

- a. Strategi SO (*Strenghts-Opportunities*) adalah strategi yang digunakan organisasi dalam mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang.
- b. Strategi WO (*Weakness- Opportunities*) adalah strategi yang digunakan organisasi dalam meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
- c. Strategi ST (*Strenght- Threats*) adalah strategi yang digunakan organisasi dalam mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk mengurangi ancaman.
- d. Strategi WT (*Weakness- Threats*) adalah strategi yang digunakan organisasi dalam meminimalisir kelemahan organisasi untuk menghindari ancaman yang dapat membahayakan organisasi.

²⁰ Ibid,

Menurut Freddy Rangkuti, fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.²¹

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Konsep Utama Penelitian

- a. Strategi pengembangan merupakan suatu rencana atau konsep kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun lembaga tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan suatu tempat atau suatu daerah dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan disertai penyusunan suatu upaya dan cara yang tepat agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik dan bahkan dapat menjadi suatu tujuan yang baru.
- b. Konsep Kabupaten/kota Layak Anak merupakan suatu daerah Kabupaten/kota yang mencanangkan daerahnya menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

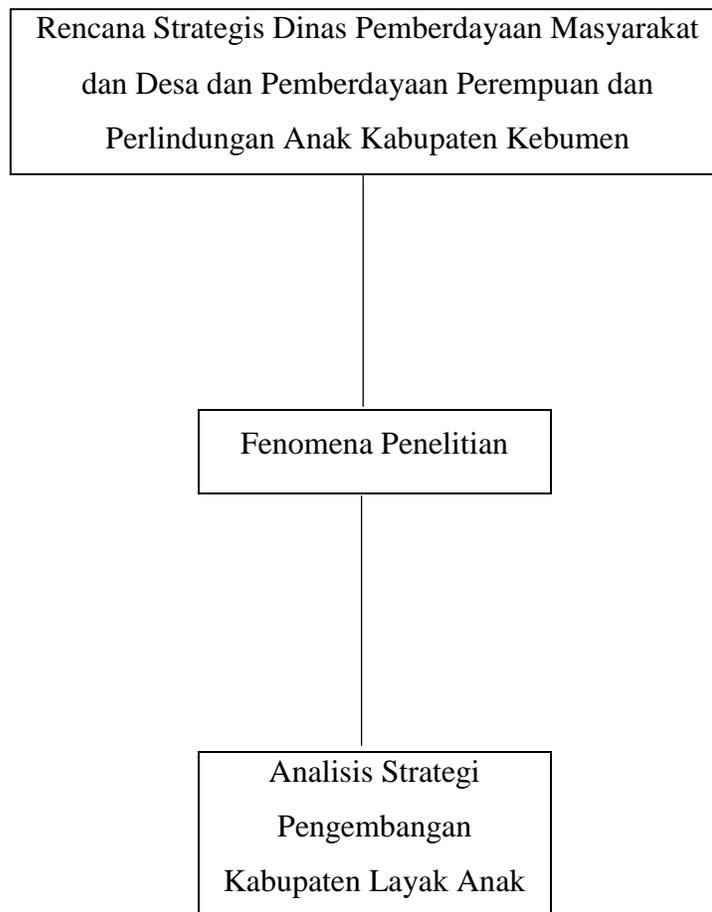
²¹ Ibid, Hal. 22

1.7.2. Indikator atau Fenomena Penelitian

1. Analisis Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
 - a. Regulasi
 - b. Komitmen
 - c. Anggaran pelaksanaan Kabupaten Layak Anak
 - d. Program/Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Kabupaten Layak Anak
 - e. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih KHA secara kualitas dan kuantitas
 - f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
 - g. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak
 - h. Kawasan tanpa rokok
 - i. Taman dengan ketersediaan permainan anak
2. Faktor Pendukung keberhasilan dilaksanakannya Kabupaten/kota Layak Anak
3. Faktor Penghambat ataupun kendala keberhasilan dilaksanakannya Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.8. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir penulis adalah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya:

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²²

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian dapat dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berupaya memberikan deskripsi atas tindakan-tindakan pemerintah Kabupaten Kebumen ke dalam bentuk kata-kata atau bahasa terkait dengan strategi pengembangan kabupaten layak anak.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen, karena Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang menginisiasi dan mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten/kota layak anak.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yakni:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak sebagai dinas yang memiliki kewenangan dalam bidang perlindungan anak di Kabupaten Kebumen.

²²Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hal. 23-24

2. DPRD Kabupaten Kebumen, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota serta berwenang dalam membentuk peraturan daerah kabupaten bersama dengan Bupati.
3. Forum Anak Kabupaten Kebumen sebagai komunitas yang mencanangkan perlindungan anak dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
4. Desa Candi Kecamatan Karanganyar sebagai Desa binaan yang berkomitmen menjadi Desa Ramah Anak.
5. Desa Adikarso Kecamatan Kebumen sebagai Desa binaan yang berkomitmen menjadi Desa Ramah Anak.
6. SMP N 2 Kebumen sebagai sekolah yang berkomitmen menjadi Sekolah Ramah Anak.
7. Puskesmas Karanganyar sebagai puskesmas yang berkomitmen menjadi Puskesmas Ramah Anak.
8. Masyarakat Kabupaten Kebumen sebagai pengguna kebijakan Kabupaten Layak Anak.

1.9.4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang mendukung dalam penelitian dibagi menjadi :²³

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini, peneliti untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh melalui sumber sekunder seperti studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku referensi, jurnal, dan studi literatur lainnya. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku, laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan strategi pengembangan layak anak.

²³ Lexy. J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakur. Hlm 157

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penting untuk menentukan ketepatan hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari:

1.9.5.1.Observasi

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin di capai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur karena maensyaratkan perilaku yang tampak, potensi perilaku seperti sikap dan minat yang masih dalam bentuk kognisi, afeksi, atau intensi atau kecenderungan perilaku tidak dapat diobservasi. Pada dasarnya tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.²⁴

Menurut John W. Creswell observasi kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan

²⁴Haris Heriansyah. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social*. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm.131-132.

yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.²⁵ Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dengan langsung turun ke lapangan untuk dapat merekam maupun mencatat hal-hal yang terkait dengan strategi yang digunakan untuk mengembangkan kabupaten layak anak di Kebumen.

1.9.5.2.Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Licoln dan Guba, antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan

²⁵John. W. Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi IV Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 254

manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²⁶

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Menurut Patton, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan yang eksplisit.²⁷

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*chek list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung (Patton dalam Poerwandari, 1998).²⁸

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) perlu dilakukan pula

²⁶ Lexy. J. Moleong. Op. Cit. Hlm. 186

²⁷ Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 131

²⁸ Ibid,

sebagai studi permulaan atau penjelajahan umum di lokasi penelitian guna menentukan fokus penelitian. Wawancara pada awal pengumpulan data sebaiknya ditetapkan topiknya secara spesifik, kemudian dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk pertanyaan yang lebih mendalam guna memperoleh data yang lebih akurat, sebelum dilakukan pertanyaan yang merupakan penutup wawancara.²⁹

b. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat izin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperluas informasi yang diperoleh dari subjek penelitian.

1.9.5.3. Studi Dokumentasi

Selain dengan observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode *library research*, yaitu studi

²⁹ Ibid, 132

³⁰ Ibid, 132

literatur dan studi dokumentasi. Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data.³¹

Menurut John W. Creswell dokumen kualitatif adalah dokumen publik (semisal surat kabar, arsip pertemuan, laporan resmi), atau dokumen pribadi (misalnya: jurnal dan diari pribadi, surat serta email).³² Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah arsip data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait strategi pengembangan kabupaten layak anak di Kebumen.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam teori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian diatas tersebut. Adapun kegiatan dalam analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan

³¹ Ibid, hlm. 140-141

³² John. W. Creswell. Op.Cit. Hlm. 329

kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Milles dan Huberman, bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Adalah proses pemuihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, pentransformasian data kasar yang muncul darilapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikemungkinan untuk menarikkesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya.³³

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitaif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

³³Suwandi Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 209-210

peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁴

1.9.7. Kualitas Data

Penelitian kualitatif memiliki instrumen utama manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya, untuk menguji kualitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Patton, ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:

a) Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b) Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat

³⁴ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 252

(*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c) Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori yang telah dijelaskan bertujuan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data. Triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

d) Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu masalah. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk pengecekannya.

Dalam penelitian ini, variasi triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data. Hal ini karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan triangulasi data maka akan diperoleh data yang mendalam karena diperoleh dari sudut pandang yang berbeda antara faktor komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Sehingga data yang dihasilkan tidak hanya memandang dari satu sudut pandang saja melainkan dari berbagai sudut pandang. Hal

tersebut akan berpengaruh pada analisis dalam penelitian ini, keberadaan data yang bervariasi akan membuat peneliti melakukan analisa lebih mendalam pada penelitian ini.³⁵

³⁵Damayanti Intan. 2018. Manajemen UPTD Kabupaten Kudus Dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat. Program Studi S1-Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Hlm. 46-47 (*SKRIPSI*)